

DARI ASING MENUJU USING: TINJAUAN HISTORIS KEBERADAAN DAN DINAMIKA IDENTITAS ETNIS TIONGHOA DI BANYUWANGI

Apdelmi¹, Mahfud², Erly Sutrisni³

¹Pendidikan Sejarah Universitas Jambi

^{2,3}Pendidikan Sejarah Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Email : apdelmi87@gmail.com¹, mahfuduntag2@gmail.com², erlysutrisni@yahoo.co.id³

ABSTRAK

Keberadaan orang-orang Tionghoa sudah ada sejak Nama Indonesia belum ada bahkan sejak awal masehi orang-orang Tionghoa sudah melakukan Interaaksi dengan penduduk Nusantara. Hai ini sebagai akibat dari hubungan dagang antara India dengan Cina. Secara umum dalam kajian ini keberadaan etnis Tionghoa mencoba dikaji sejak zaman klasik sampai dengan zaman orde baru. Penduduk Tionghoa dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu Orang Tionghoa adalah orang Tionghoa asli sedang peranakan adalah orang Tionghoa hasil kawin campur dengan penduduk setempat. Kedua, tempat kelahiran. Tionghoa totok lahir di negeri Cina sedangkan Tionghoa peranakan lahir di Indonesia. Ketiga adalah berdasarkan aspek sosial cultural. Tionghoa totok masih berbahasa mandarin dan memegang teguh tradisi China, sedangkan tionghoa keturunan sudah berbaur dan bercampur dengan tradisi setempat dan menggunakan bahasa masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan etnis Tionghoa dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu Kehidupan sosial kebudayaan masyarakat Tionghoa dan Pribumi di Blambangan; Kehidupan sosial keagamaan masyarakat Tionghoa dan Pribumi di Blambangan; Interaksi sosial etnis Tionghoa dengan masyarakat blambangan; dan akulturasi budaya masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Blambangan.

Kata Kunci: *Etnis, Tionghoa, Blambangan, Identitas, Banyuwangi*

PENDAHULUAN

Suku bangsa Tionghoa adalah salah satu etnis di Indonesia. Orang-orang Tionghoa telah banyak datang ke Nusantara pada abad ke-4 masehi untuk kepentingan agama, politik dan ekonomi. Pada abad ke-14, Dinasti Ming mengirimkan duta keliling yang dipimpin Cheng Ho ke seluruh daerah-daerah di Asia Tenggara termasuk Jawa. Misi tersebut terdiri dari satu armada yang meliputi 62 kapal dengan pengikut 37.000 tentara. Masa-masa Cheng Ho datang di Pulau Jawa ia mencatat bahwa sudah banyak orang Tionghoa yang bertempat tinggal untuk sementara waktu. Mereka kebanyakan bertempat tinggal di Tuban dan Surabaya.

Pada mulanya migrasi orang Cina ke Nusantara dalam kelompok kecil. Migrasi orang Cina secara massif, terjadi sekitar abad keenam belas sampai kira-kira pertengahan abad kesembilan belas, asal dari suku bangsa Hokkian. Mereka berasal dari Provinsi Fukien bagian selatan. Daerah ini merupakan daerah yang sangat penting dalam pertumbuhan dagang orang China ke seberang lautan. Orang Hokkian dan keturunannya telah banyak *pengembangan tersebut kebanyakan adalah wisata alam, tetapi pengembangan wisata budaya masih sangat sedikit yang hanya terfokus pada Desa Kemiren. Sedangkan untuk pariwisata sejarah masih belum dikembangkan sama sekali. Padahal kalau kita amati Banyuwangi* berasimilasi dengan orang Indonesia, yang sebagian besar terdapat di Indonesia Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur dan pantai barat Sumatera (Vasanty 1990:353).

Kehadiran VOC pada awal abad 16 turut menyuburkan arus migrasi orang Tionghoa ke Nusantara. Ketika pelabuhan Malaka dan Banten gagal dikuasai, VOC menjadikan Batavia sebagai pusat perniagaan sekaligus pusat pemerintahan. Tahun 1619 benteng Batavia didirikan oleh Jan Piters zoen Coen. Ia mengusahakan agar para orang Tionghoa menetap di Batavia supaya mereka dapat menyediakan pangan dan keahlian pertukangan dalam membangun kota.

Pola migrasi orang Tionghoa antara ke Jawa dengan Sumatra atau Kalimantan sangatlah berbeda. Onghokham (2008:2) menjelaskan, orang Tionghoa yang bermigrasi ke Pulau Jawa, datang secara perorangan atau dalam kelompok-kelompok kecil. Oleh karena itu interaksi dengan penduduk yang padat sekali, sedikit banyak terintegrasi di dalam masyarakat. Di Jawa, orang Tionghoa biasanya tidak merasa Tionghoa. Mereka kehilangan bahasa setelah satu dua generasi. Sedangkan di Sumatera Utara, misalnya, di sekitar Medan, etnis Tionghoa didatangkan per komunitas seperti bedol desa dari Tiongkok, dari kelompok-kelompok besar. Interaksi mereka dengan penduduk setempat juga sangat baik, karena penduduk setempat tidak begitu padat. Masyarakat pribumi di sana bisa menerima komunitas-komunitas Tionghoa tetap berbahasa Mandarin dan seterusnya atau kebudayaan Tiongkok.

Perpindahan orang Cina tersebut ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan baru di negeri perantauannya, baik untuk tempat tinggal, tempat berdagang hingga tempat beribadah. Tempat ibadah orang Cina di Indonesia kemudian dikenal dengan nama kelenteng. Kelenteng selalu ada di setiap perkampungan orang Cina atau yang dikenal dengan Pecinan. Pecinan termasuk juga kampung-kampung untuk etnis lain (seperti kampung Melayu, kampung Arab, dan sebagainya) merupakan kebijakan dari VOC/Belanda yang membagi masyarakat Hindia Belanda dalam tiga golongan. Yakni, golongan Eropa atau Belanda; golongan Timur Asing termasuk Cina, Arab dan India; serta golongan pribumi.

Dalam perkembangan selanjutnya banyak orang-orang Tionghoa yang melakukan akulturasi budaya dengan budaya lokal nusantara, salah satunya adalah dengan kebudayaan Blambangan. Dalam artikel ini akan mencoba membahas awal mula kedatangan orang-orang Tionghoa ke Blambangan dan interaksinya dengan masyarakat Blambangan.

METODE

Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif dengan kasus tunggal (Sutopo, 2006: 136). Penentuan lokasi penelitian ini selain dibingkai secara teoritis juga dilandasi pertimbangan operasional. Untuk lokasi penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan tepat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam dan mempertimbangkan apakah lokasi penelitian ini memberi peluang yang menguntungkan untuk dikembangkan atau dikaji. Dengan demikian maka ditentukan lokasi penelitian di Situs Kendenglembu yang terletak di Desa Karangharjo, Glenmore, Banyuwangi dengan pertimbangan 1) Situs Kendenglembu merupakan situs cagar budaya yang memiliki sumberdaya arkeologi yang beragam mulai dari sumber daya arkeologi prasejarah, klasik, dan masa colonial; 2) letak Situs Kendenglembu secara geografis sangat strategis dan mudah untuk diakses; 3) Situs Kendenglembu memiliki daerah pendukung berupa panorama alam, hasil pertanian, dan perkebunan.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen (Sugiyono, 2009: 222; Nasution, 1996: 54). Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2009: 222).

Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian dan jenis sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 1) Wawancara mendalam (*in-dept interviewing*), dalam melakukan wawancara penentuan informan ditentukan dengan Teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan informan atau sampel yang sesuai dengan tujuan peneliti (Mulyana, 2004: 187; Sugiyono, 2009: 216; Sukmadinata, 2009: 216; Sarosa, 2012). Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki banyak pengetahuan tentang objek penelitian, yakni kepala desa, tetua/sesepuh desa, masyarakat di sekitar situs Kendenglembu, pengelola PTPN XII Kendenglembu, Sejarawan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Arkeologi, dan Pelaku wisata. Dalam melakukan wawancara menggunakan instrumen wawancara berupa pedoman wawancara, alat perekam, dan alat pencatat; 2) Observasi langsung dilakukan dengan cara mendatangi lokasi penelitian (Sukmadinata, 2009: 220). Dalam hal ini digunakan observasi partisipasi, observasi tidak berstruktur (Bungin, 2009: 115). Adapun yang diobservasi adalah situs Kendenglembu, objek disekitar situs, peninggalan utama situs, dan objek pendukung situs; dan 3) selanjutnya data yang digunakan adalah Dokumen baik dokumen tertulis (*hardcopy*) maupun dokumen elektronik (*softcopy*) (Sukmadinata, 2009: 221; Sarosa, 2012: 61). Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah arsip di kantor kepala desa Karangharjo, arsip yang dimiliki oleh PTPN XII baik berupa koran, arsip, dan gambar-gambar.

Teknik Validasi Data

Sedangkan untuk validasi data menggunakan triangulasi yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik pengembangan validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi (Patton, 1980: 161). Denzin, Lincon (2009: 271) dan Sutopo, 2006: 95) merangkum 4 tipe dasar teknik triangulasi, yaitu: 1) Triangulasi data (*Data Triangulation*) dilakukan dengan cara menguji keabsahan sumber data yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, maupun observasi; 2) Triangulasi peneliti (*Investigator Triangulation*) akan dibandingkan hasil-hasil penelitian yang relevan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti; 3) Triangulasi teori (*Theory triangulation*) dilakukan dengan menggunakan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding (Bungin, 2009: 257); dan 4) Triangulasi metodologis (*methodological triangulation*) dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan metode yang berbeda. Data sejenis yang dikumpulkan dengan metode yang berbeda dibandingkan dan ditarik simpulan data yang lebih kuat validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Awal Masuknya Etnis Tionghoa Di Tanah Jawa

Sebelum berdirinya Negara yang diberi nama Indonesia di tanah Jawa ini etnis Tionghoa sudah menginjakkan kaki di tanah Jawa ini. Dari berbagai catatan sejarah para pedagang Tionghoa telah datang ke daerah pesisir laut Cina selatan sejak 300 tahun sebelum masehi, namun catatan sejarah tertulis menunjukkan mereka datang ke Asia Tenggara lama setelah itu. Beberapa catatan tertua ditulis oleh para agamawan, seperti Fa Hien pada abad ke-4 dan I Ching pada abad ke-7. Fa Hien melaporkan suatu kerajaan di Jawa ("*To lo mo*") dan I Ching ingin datang ke India untuk mempelajari agama Buddha dan singgah di Jawa untuk mempelajari bahasa Sanskerta. Di Jawa, ia berguru pada seseorang yang bernama Janabhadra. Dalam catatan kuno Cina menyebutkan bahwa kerajaan-kerajaan kuno Jawa sudah menjalin hubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina.

Pada awalnya mereka hanya tinggal beberapa waktu yang pendek selama masa kunjungan perdagangan yang dilakukan di beberapa kota pesisir. Namun melihat kekayaan dan potensi tanah Jawa pada tahun-tahun berikutnya banyak etnis Tionghoa berdatangan dan menetap di Jawa untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik dengan tujuan utamanya adalah berdagang. Kedatangan mereka (etnis Tionghoa) diterima dengan baik oleh warga pribumi, akulturasi yang berjalan antara dua kebudayaan tersebut berjalan dengan baik.

Bahkan karena para perantau Tionghoa yang datang ke Jawa di dominasi oleh kaum laki-laki orang-orang Tionghoa ini kemudian menikah dengan wanita-wanita pribumi. Banyak diantara anak-anak mereka ini memeluk agama Islam dan banyak diantara mereka ini yang menikah dengan anak-anak wanita dari keluarga kerajaan. Hal inilah yang menjadi salah satu jalan penyebaran agama Islam di Nusantara oleh orang-orang Tionghoa. Kedekatan orang-orang Tionghoa dengan kerajaan yang berkuasa pada saat itu diantaranya Majapahit abad pada masa kekuasaan Hayam Wuruk memberi banyak keuntungan, diantaranya muncul berbagai perlakuan istimewa terhadap orang asing dengan memberikan kedudukan setara dengan pejabat dan memberikan wewenang kepada orang-orang asing diantaranya orang-orang Tionghoa.

Tak heran jika berbagai perlakuan istimewa didapatkan oleh orang-orang Tionghoa karena keberadaan mereka bisa dikatakan sangat berperan besar dalam perkembangan perekonomian di tanah Jawa, khususnya kemakmuran Majapahit. Orang-orang Tionghoa yang menetap di Jawa mengembangkan kota-kota pelabuhan penting di pantai utara seperti Gresik, Tuban dan Surabaya. Mereka adalah pioneers pertama dari imigran-imigran Tionghoa ke *Nan-Yang* (Lautan Selatan). Hal ini tentunya mengantarkan kerajaan Majapahit pada perdagangan internasional, dan menjadikannya sebagai pasar komoditif berkualitas dari India dan Cina.

Namun dibalik keadaan Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya pada saat itu terdapat sebuah kondisi stratifikasi sosial dalam catatan Ma Huan ketika ia mengunjungi Ibu kota kerajaan Majapahit, Trowulan dalam armada pelayaran Cheng Ho. Dalam catatannya terdapat tiga kelompok sosial disana yaitu.

1. Masyarakat Muslim *Huihui* atau *Huihui ren* yang berasal dari barat dan menetap disana. Disebutkan bahwa pakaian dan makanan mereka bersih dan layak (dalam manuskrip asli Ma Huan yang memakai aksara Cina jelas disebutkan *Huihui*, sedangkan dalam terjemahan Indonesia kata ini dirubah maknanya yaitu kelompok Arab. Padahal aksara itu dikalangan Arab adalah *Ta Shih*).
2. Masyarakat Tionghoa atau *Tang ren* yang berasal dari *Guangdong, zhangzou, dan Quazhou*. Mereka adalah pelarian dari daerah asalnya dan menetap di Ibu kota kerajaan Majapahit. Pakaian dan makanan mereka sangat layak dan bagus. Mayoritas

dari kelompok ini adalah beragama islam dan mengajarkan ajarannya.

3. Penduduk pribumi. Menurut Ma Huan, kelompok ini sangat kotor dan jelek. Tidak memakai alas kaki dan makanan mereka tidak layak namun banyak dari mereka yang kaya dan menyukai barang mewah seperti porselen dari Cina. Perbedaan antara raja dan rakyat sangat kentara, seperti keraton raja yang megahsedangkan rumah tinggal penduduk hanya beralaskan jerami.

Dalam catatan tersebut menunjukkan bahwa kejayaan yang diperoleh oleh kerajaan Majapahit tidak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat Majapahit yang masih hidup pada tingkatan sosial paling bawah dibawah bangsa asing yang mendiami tanah jawa ini. Kedudukan orang Tionghoa yang beragama islam dengan kemapanannya juga sangat berpengaruh terhadap penyebaran dan perkembangan ajaran islam di Majapahit. Karena dengan kedudukan tersebut akan dengan mudah bagi orang Tionghoa yang beragama islam untuk memberikan pengaruhnya terhadap orang pribumi keluarga kerajaan untuk memplajari ajaran islam. Bahkan banyak diantara anggota keluarga kerajaan yang menikah dengan orang-orang Tionghoa yang beragama islam yang pada akhirnya memeluk islam dan hal ini sangat berpengaruh kepada rakyat majapahit untuk memeluk agama islam.

Setelah ratusan tahun berlalu, kebudayaan Tionghoa semakin berbaur dengan tatacara kehidupan komunitas yang lebih dulu menapakkan kaki di Nusantara Bahkan dalam hal tertentu, kebiasaan atau istilah tertentu yang sepertinya khas Tionghoa, ternyata hanya ditemukan di Nusantara, tidak di daerah lain. Hal itu dikarenakan pertalian antar budaya etnis yang kuat sehingga menimbulkan ciri khas tersendiri. Hal ini diperkuat dengan beberapa bukti sejarah, diantaranya beberapa motif relief di Candi Sewu yang berada di wilayah Blambangan diduga juga mendapat pengaruh dari motif-motif kain sutera Tiongkok. Perpaduan budaya Tionghoa dengan Jawa telah menghasilkan berbagai barang seni kerajinan yang bermutu tinggi. Hal ini Nampak jelas pada corak batik pesisir. Motif tradisional Jawa berbaur dengan corak Tionghoa. Gambar lilin, yaitu hewan kahyangan dalam mitologi Tionghoa sering terlihat dalam batik cirebonan.

Etnis Tionghoa Pada Masa VOC

Pada masa VOC menguasai Nusantara antara tahun 1606-1799. Dunia perdagangan Nusantara di monopoli oleh VOC. Hanya VOC yang boleh berhubungan dagang dengan penguasa setempat. VOC menjual barang yang berasal dari Eropa dan Jepang kepada penduduk setempat melalui kaum bangsawan, dan sebaliknya mereka membeli bahan mentah produk pertanian, perkebunan, dan hutan dari penduduk setempat. Pedagang Tionghoa masih diberi kesempatan untuk menjual barang-barang produk Cina yang mereka bawa dari daratan Cina. Sementara itu berbagai penduduk Tionghoa yang bukan pedagang mulai makin banyak pergi merantau keluar dan masuk Nusantara. Di Nusantara, mereka khususnya masuk ke Batavia, mereka bekerja sebagai kuli dan tukang. Mereka adalah orang-orang miskin, atau musuh negara yang dikejar-kejar pemerintah Tionghoa.

Begitu besarnya jumlah perantau Tionghoa di Batavia pada masa itu, menimbulkan kekhawatiran kompeni hingga dibuat suatu ketentuan migrasi baru. Salah satunya berbunyi bahwa orang Tionghoa yang sudah tinggal di batavia antara 10-12 tahun, tetapi belum mendapatkan izin tetap akan dideportasi ke Tiongkok. Namun pada tahun 1729 VOC mengeluarkan amnesti imigrasi yang menyatakan bahwa orang Tionghoa yang belum mempunyai izin diperkenankan untuk mengajukannya dengan membayar dua

ringgit. Akibat diberlakukannya peraturan ini orang-orang Tionghoa menjadi bulan-bulanan oleh para pejabat VOC dan menjadi ajang pemerasan, karena orang-orang ditangkap dan akan dilepas setelah memberikan uang.

Dalam fase ini kita mencatat peristiwa penting, bagaimana posisi pedagang Tionghoa yang mendominasi dunia perdagangan Nusantara diambil alih oleh VOC. VOC memberikan sedikit ruang dan kesempatan bagi orang Tionghoa sebagai pedagang kecil keliling. Sementara itu, populasi perantau Tionghoa terus meningkat naik di Batavia khususnya dan di Nusantara umumnya. Berbagai tekanan dan perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh VOC terhadap orang-orang Tionghoa dan pribumi tersebut menyulut kebencian orang-orang Tionghoa dan pribumi terhadap VOC. Hingga mencapai puncaknya pada tahun 1740, sehingga mereka berani membentuk sebuah koalisi dan mengorganisir satu pemberontakan melawan pemerintah VOC di Batavia.

Namun pemberontakan ini dapat dipadamkan seketika oleh VOC dengan memprakarsai pembantaian terhadap orang Tionghoa oleh orang-orang pribumi dengan iming-iming hadiah untuk per kepala orang Tionghoa yang di dapatkan, kejadian menimbulkan korban yang begitu banyak di kalangan perantau Tionghoa. Sehingga peristiwa ini juga terkenal dengan nama *The Chinese Massacre* (Pembunuhan terhadap orang Tionghoa). Dalam fase ini kita mencatat peristiwa penting, bagaimana posisi pedagang Tionghoa yang mendominasi dunia perdagangan Nusantara diambil alih oleh VOC. VOC memberikan sedikit ruang dan kesempatan bagi orang Tionghoa sebagai pedagang kecil keliling. Sementara itu, populasi perantau Tionghoa terus meningkat di Batavia khususnya dan di Nusantara umumnya.

Etnis Tionghoa Pada Masa Kolonial Belanda

Jatuhnya VOC pada tahun 1799, membuat kekuasaan politik Nusantara diserahkan kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Pada masa ini, kegiatan ekonomi dalam skala besar, khususnya dalam bidang perdagangan, berada di tangan orang Eropa. Orang-orang Tionghoa dan orang Non-Nasrani lain tidak diperbolehkan memperdagangkan barang produk Eropa, Amerika, dan Afrika secara langsung. Orang Tionghoa hanya boleh menjadi pedagang perantara antara pedagang besar orang Eropa dan penduduk Pribumi.

Situasi seperti ini secara umum terlihat sampai tahun 1870, ketika sistem tanam paksa dihapus, dan liberalisasi ekonomi Hindia Belanda dimulai. Dari sini seterusnya kegiatan ekonomi pengusaha Tionghoa kembali marak dan maju, khususnya dalam bidang industri dan perdagangan menengah. Kegiatan ekonomi Tionghoa di Nusantara juga dapat dilihat dari segi regional. Secara umum, di pulau Jawa perantau Cina bergerak dalam bidang perdagangan. Sebagian kecil bergiat dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hanya sedikit yang masuk ke dalam kegiatan pertambangan. Sementara itu di luar Jawa justru pertambangan dan perkebunan yang menarik banyak pengusaha Cina ini.

Posisi yang kuat dari pengusaha Eropa dalam kegiatan perekonomian di Indonesia pada zaman penjajahan dapat di maklumi dan dianggap wajar oleh banyak orang, mengingat kekuasaan politik yang berada di tangan penjajah Belanda. Tapi kuatnya posisi pengusaha Tionghoa pada masa itu, sering menjadi kekaguman banyak pengamat, dan keadaan ini biasanya dianggap berkaitan secara kuat dengan jiwa kewira-usahaan mereka. Karena superioritas Tionghoa di bidang perdagangan tersebut menurut beberapa ilmuwan seperti *Victor Purcell* dan *Lea Williams*, justru penguasa kolonial Belanda memiliki sentimen anti Cina yang sangat besar.

Sentimen anti Cina ini memuncak pada zaman Politik Etis, ketika Belanda merasa

perlu melindungi penduduk pribumi terhadap "kelicinan" Tionghoa. Sebab sepanjang sejarah, orang Tionghoa menempati kedudukan sebagai pedagang perantara Eropa dengan pribumi dan mendominasi perdagangan di jalan-jalan utama tiap kota di Jawa. Kedudukan ekonomi ini hingga saat itu tetap bertahan atau dipertahankan. Sebagai kelompok yang berkuasa dan berpengaruh besar di bidang ekonomi tentunya etnis Tionghoa membuat pemerintah kolonial hindia belanda merasa terancam dengan keberadaannya. Sehingga untuk memperlancar monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia pemerintah kolonial mulai membuat berbagai propaganda dengan kekuasaannya dan memecah belah kerukunan antara etnis di Indonesia.

Dengan kekuasaan politik yang dimilikinya, pemerintah Hindia Belanda membuat berbagai peraturan, salah satunya dengan membagi masyarakat ke dalam tiga golongan rasial yang terdiri dari Eropa, Timur Asing (Cina, Arab, dan lain-lain) dan pribumi. Sampai kira-kira tahun 1910, setiap golongan ras ditetapkan tinggal di masing-masing kampung sehingga ada kampung Cina, Kampung Arab, Kampung Bugis, Kampung Melayu dan lain-lain.¹ Pembatasan terhadap mobilitas badniah itu, bagi golongan Timur Asing seperti Tionghoa dipertegas dengan keharusan memiliki pas jalan bagi perjalanan dari satu kampung Cina ke yang lain. Sistem pembatas bergerak itu dikenal sebagai *Passenstelse* dan *Wijkenstelsel* (sistem pas jalan dan perkampungan) terlihat seperti sistem *Apartheid* yang kemudian dikenal di Afrika Selatan yang pada akhirnya runtuh juga.

Dengan demikian banyak prasangka yang dilontarkan oleh warga pribumi mengatakan bahwa golongan penduduk Tionghoa selalu diprioritaskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hingga timbul rasa cemburu pada golongan yang menduduki kelas sosial paling bawah di bawah etnis Tionghoa yang notabene adalah pendatang. Politik kolonial anti Cina ini menyebabkan timbulnya gerakan emansipasi atau gerakan Cina-Jawa. Mereka menuntut persamaan hak dengan orang Eropa. Gerakan ini adalah yang pertama dari segolongan penduduk di masyarakat Hindia Belanda yang bergerak menghadapinya. Gerakan ini berhasil menghapus semua pembatas terhadap mobilitas fisik orang Tionghoa (*keharusan tinggal di kampung Cina dan pas jalan bagi orang Cina*).

Pada awal abad 20 berbagai gerakan nasional Indonesia mulai bermunculan guna mengakhiri pemerintahan kolonial dan mendirikan suatu negara yang berkebangsaan Indonesia. Dari gerakan ini muncullah berbagai partai Nasionalis yang melatarbelakangi terciptanya lambang-lambang kebangsaan seperti bahasa nasional, bendera kebangsaan dan lagu kebangsaan.

Namun pada masa-masa itu orang-orang Tionghoa mulai tersingkir dari berbagai pergerakan nasional. Hal ini ditandai dengan berdirinya organisasi- organisasi sosial-politik yang berdiri atas kelompok-kelompok etnis atau rasial. Berbagai gerakan nasionalis yang ada pada saat itu seperti Partai Nasionalin Indonesia (PNI), Partindo, PNI Baru dan Parindra juga menutup diri dari keanggotaan penduduk non-pribumi. Bahkan salah satu gerakan paling berpengaruh saat itu misalnya Sarekat Islam juga bernadakan anti Tionghoa. Berbagai partai politik yang berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam kurun 1920-1030 menolak untuk memberi kesempatan kepada para aktifis politik Tionghoa yang berorientasi ke nasionalisme Indonesia untuk menjadi bagian dari partai mereka.

Pada tahun-tahun itu, konsepsi Indonesia sebagai konsep politik lahir, dan puncaknya terjadi pada tahun 1928: Lahirnya Sumpah Pemuda yang dianggap sebagai tanda pengesahan kebangsaan Indonesia. Namun dalam acara tersebut berbagai

¹ Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*. hlm, 73.

organisasi kesukuan di wilayah Indonesia (kecuali pemuda Irian Jaya) menghadirkan perwakilannya, namun organisasi-organisasi Tionghoa tidak ikut serta. Pengecualian dari kecenderungan ini adalah konsep "Indisch" atau "Hindia" dari *Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara)* pada tahun 1909.

Gerakan Cina-Jawa pada dasarnya bergerak demi golongan Tionghoa itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan adanya gerakan Nasionalisme Cina di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 yang menyebabkan kaum Tionghoa mulai berorientasi ke China seperti Tionghoa Hwee Koan dan Siang Hwee. Ini dapat di mengerti mengingat politik apartheid pemerintah kolonial sehingga setiap golongan rasial penduduk hanya bergerak demi golongannya sendiri. Ini menjadi khas zaman pergerakan pada masa Hindia Belanda. Ketika pergerakan "nasional" timbul, gerakan-gerakan itu tetap saja bergerak hanya demi tiap-tiap golongan penduduk. Misalnya, Jawa demi Jawa (Boedi Oetomo/Jong Java), Sumatra demi Sumatra (Jong Sumatra), Ambon demi Ambon (Jong Ambon).

Menjelang kemerdekaan Indonesia, yakni pada masa pendudukan Jepang kesadaran atas etnisitas semakin diperkuat. Golongan Tionghoa diurus secara terpisah dari penduduk pribumi serta didorong agar mempertahankan identitas etnisnya. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau dalam UUD 1945 yang diterima oleh para nasionalis menetapkan bahwa "Presiden Republik Indonesia haruslah seorang asli Indonesia". Hal ini tentunya secara tidak langsung menolak dan menganggap bahwa warga keturunan Tionghoa lokal dan peranakan lain yang ada di Indonesia bukan bagian dari negara Indonesia dan menolak keberadaan warga keturunan Tionghoa dan peranakan lain.

Keadaan semacam ini membuat kurangnya interaksi antara orang Tionghoa dengan Pribumi hingga muncul berbagai stereotip antara kedua golongan tersebut. Orang-orang pribumi memandang orang Tionghoa sebagai kelompok yang eksklusif yang hanya mementingkan keuntungan dalam bisnis. Sementara orang Tionghoa memandang orang Pribumi sebagai kelompok masyarakat yang pemalas dan pemeras karena orang-orang Pribumi yang mendapat kedudukan tinggi dalam pemerintahan sering memeras para pengusaha Tionghoa. Berbagai faktor diatas sering menyebabkan berbagai kerusuhan anti Tionghoa.

Etnis Tionghoa Pada Masa Pemerintahan Orde lama

Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Setelah lepas dari pendudukan Jepang yang melarang semua partai politik, baik partai Pribumi, Belanda, maupun Tionghoa, bermunculan kembali berbagai golongan Tionghoa dengan berbagai orientasi, baik berorientasi ke China maupun ke Hindia Belanda. Dengan adanya konflik Indonesia-belanda, berbagai partai politik mulai terbuka bagi keanggotaan terhadap etnis Tionghoa. Hal ini dilakukan untuk memperoleh dukungan dari etnis Tionghoa demi tercapainya tujuan para nasionalis.

Golongan Tionghoa yang berorientasi ke Indonesia mulai menunjukkan taringnya, diantaranya Persatuan Tionghoa pada tahun 1948 yang kemudian menjadi Partai Demokrat Tionghoa (PDTI, 1950-1954) dan juga organisasi- organisasi lainnya yang berorientasi ke Indonesia lainnya seperti Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKRI). Namun pada umumnya para kaum Tionghoa totok tetap berorientasi pada negara China. Hal ini tentunya terjadi karena berbagai sebab, diantaranya terbentuknya RRC pada tahun 1949. Yang pada dasarnya meneruskan nasionalisme China. RRC mengeluarkan kebijakan terhadap orang-orang keturunan

Tionghoa yang ada di berbagai tempat sebagai warga negara China yang menyebabkan ketegangan antara pemerintah Indonesia dan China.

Setelah tahun 1950an, pemerintah Republik Indonesia berusaha membangun kehidupan ekonomi Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan pengusaha Pribumi. Dengan demikian, secara tidak langsung di khawatirkan akan membawa efek kepada kelangsungan dominasi pengusaha Tionghoa. Untuk memperkuat pengusaha pribumi dalam persaingan dagang pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna melindungi kekuatannya. Kebijakan ini salah satunya dituangkan dalam “Program Benteng” yang pemikiran dasarnya bersumber dari prasaran Mr. Assaat, “Perlindungan Khusus” dalam Kongres Importir Nasional Seluruh Indonesia di Surabaya 19-23 Maret 1956. Isi dari proposal ini antara lain:

1. Pembinaan perusahaan milik pengusaha Pribumi dengan cara memberikan fasilitas kredit bank dan lisensi import-eksport secara khusus.
2. Menutup komoditi-komoditi dan pasar-pasar domestik tertentu dari penetrasi pengusaha asing dan keturunan asing, dan sebaliknya menyediakan pasar tersebut bagi pengusaha Pribumi.

Ternyata kebijakan ini tidak menggoyahkan peranan dan kekuatan dari pengusaha Tionghoa. Hanya beberapa pengusaha Pribumi yang berhasil maju melalui program ini. Sebagian besar yang lain, karena kekurangan modal, telah menjual “lisensi” khusus yang mereka peroleh dari pemerintah kepada pengusaha tionghoa, sehingga munculah perusahaan-perusahaan Ali-Baba. Perusahaan itu secara resmi adalah atas nama pengusaha Pribumi, tetapi modal dan pengusahaannya adalah pengusaha Cina. Setelah itu menyusul berbagai kebijakan lain, antara lain adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959 yang melarang semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa mulai dari 31 Desember 1959.

Pada zaman “Demokrasi Terpimpin” Presiden Soekarno (1959-1965), banyak perusahaan besar Belanda yang di nasionalisasi dalam rangka perjuangan merebut kembali Irian Barat. Perusahaan-perusahaan ini dijadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada masa ini pengusaha tionghoa terlihat kurang mendapat kesempatan untuk bergerak dalam usaha skala besar, tapi usaha perekonomian skala menengah dan kecil masih tetap dalam dominasi tangan mereka.

Kedekatan presiden Soekarno yang anti-kolonialis dengan Partai Komunis yang berideologi kekiri dan berorientasi ke Uni Soviet dan RRC yang secara tidak langsung memperluas ruang gerak PKI (Partai Komunis Indonesia) yang lebih dekat ke China dalam berbagai sektor pemerintahan dalam negeri. Namun hal itu menjadi bomerang bagi orang Tionghia di Indonesia, karena pada peristiwa kudeta pemerintahan Soekarno yang populer dengan peristiwa G30S (Gerakan 30 September) terjadi pembantaian masal terhadap para anggota PKI. Peristiwa ini menjadikan orang-orang Tionghoa di Indonesia sebagai kambing hitam atas peristiwa tersebut karena kedekatan PKI dengan RRC dan menganggap semua orang Tionghoa adalah komunis. Peristiwa tersebut menimbulkan perpecahan antara orang Tionghoa dengan Pribumi dan menanamkan kebencian terhadap orang Tionghoa yang dipandang sebagai komunis hingga menyebabkan pembantaian besar-besaran terhadap orang Tionghoa.

METODE

Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif dengan kasus tunggal (Sutopo, 2006: 136). Penentuan lokasi penelitian ini selain dibingkai secara

teoritis juga dilandasi pertimbangan operasional. Untuk lokasi penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan tepat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam dan mempertimbangkan apakah lokasi penelitian ini memberi peluang yang menguntungkan untuk dikembangkan atau dikaji. Dengan demikian maka ditentukan lokasi penelitian di Situs Kendenglembu yang terletak di Desa Karangharjo, Glenmore, Banyuwangi dengan pertimbangan 1) Situs Kendenglembu merupakan situs cagar budaya yang memiliki sumberdaya arkeologi yang beragam mulai dari sumber daya arkeologi prasejarah, klasik, dan masa colonial; 2) letak Situs Kendenglembu secara geografis sangat strategis dan mudah untuk diakses; 3) Situs Kendenglembu memiliki daerah pendukung berupa panorama alam, hasil pertanian, dan perkebunan.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen (Sugiyono, 2009: 222; Nasution, 1996: 54). Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2009: 222).

Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian dan jenis sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 1) Wawancara mendalam (*in-dept interviewing*), dalam melakukan wawancara penentuan informan ditentukan dengan Teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan informan atau sampel yang sesuai dengan tujuan peneliti (Mulyana, 2004: 187; Sugiyono, 2009: 216; Sukmadinata, 2009: 216; Sarosa, 2012). Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki banyak pengetahuan tentang objek penelitian, yakni kepala desa, tetua/sesepuh desa, masyarakat di sekitar situs Kendenglembu, pengelola PTPN XII Kendenglembu, Sejarahwan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Arkeologi, dan Pelaku wisata. Dalam melakukan wawancara menggunakan instrumen wawancara berupa pedoman wawancara, alat perekam, dan alat pencatat; 2) Observasi langsung dilakukan dengan cara mendatangi lokasi penelitian (Sukmadinata, 2009: 220). Dalam hal ini digunakan observasi partisipasi, observasi tidak berstruktur (Bungin, 2009: 115). Adapun yang diobservasi adalah situs Kendenglembu, objek disekitar situs, peninggalan utama situs, dan objek pendukung situs; dan 3) selanjutnya data yang digunakan adalah Dokumen baik dokumen tertulis (*hardcopy*) maupun dokumen elektronik (*softcopy*) (Sukmadinata, 2009: 221; Sarosa, 2012: 61). Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah arsip di kantor kepala desa Karangharjo, arsip yang dimiliki oleh PTPN XII baik berupa koran, arsip, dan gambar-gambar.

Teknik Validasi Data

Sedangkan untuk validasi data menggunakan triangulasi yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik pengembangan validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi (Patton, 1980: 161). Denzin, Lincon (2009: 271) dan Sutopo, 2006: 95) merangkum 4 tipe dasar teknik triangulasi, yaitu: 1) Triangulasi data (*Data*

Triangulation) dilakukan dengan cara menguji keabsahan sumber data yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, maupun observasi; 2) Triangulasi peneliti (*Investigator Triangulation*) akan dibandingkan hasil-hasil penelitian yang relevan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti; 3) Triangulasi teori (*Theory triangulation*) dilakukan dengan menggunakan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding (Bungin, 2009: 257); dan 4) Triangulasi metodologis (*methodological triangulation*) dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan metode yang berbeda. Data sejenis yang dikumpulkan dengan metode yang berbeda dibandingkan dan ditarik simpulan data yang lebih kuat validitasnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat induktif yaitu teknik analisis yang tidak dimaksudkan untuk membuktikan suatu prediksi atau hipotesis penelitian, tetapi simpulan dan teori yang dihasilkan berbentuk dari data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini analisis induktif yang digunakan adalah teknik analisis interaktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan selalu diinteraksikan atau dibandingkan dengan unit data yang lain (Miles, M. B., & Huberman, A. M, 2014: 31-33). Dalam proses analisis interaktif terdapat 4 komponen yang harus dipahami oleh peneliti yaitu: (1) *Data Collection*, (2) *Data Condensation*, (3) *Data Display*, (4) *Conclutions Drawing/ Verfyng*.

PEMBAHASAN

Kehidupan sosial kebudayaan masyarakat Tionghoa dan Pribumi di Blambangan

Seperti yang di kemukakan oleh para ahli dalam penelitian terhadap masyarakat Tionghoa, pada umumnya membagi etnis Tionghoa menjadi dua golongan yaitu totok dan peranakan. Skinner menggolongkan orang Tionghoa berdasarkan haluan budaya dan pemikiran orang Tionghoa. Orang totok adalah mereka yang berorientasi pada negeri Cina (sekarang disebut Tiongkok) meskipun lahir di Indonesia. Sedangkan Tionghoa peranakan adalah mereka yang tinggal bersama masyarakat setempat dan menerapkan pola budaya masyarakat setempat.

Namun Charles Coppel membedakan golongan ini berdasarkan tiga aspek. Pertama berdasarkan ras. Orang Tionghoa adalah orang Tionghoa asli sedang peranakan adalah orang Tionghoa hasil kawin campur dengan penduduk setempat. Kedua, tempat kelahiran. Tionghoa totok lahir di negeri Cina sedangkan Tionghoa peranakan lahir di Indonesia. Ketiga adalah berdasarkan aspek sosial cultural. Tionghoa totok masih berbahasa mandarin dan memegang teguh tradisi China, sedangkan tionghoa keturunan sudah berbaur dan bercampur dengan tradisi setempat dan menggunakan bahasa masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan masyarakat pribumi di Blambangan merupakan sebuah kelompok masyarakat yang santun dan juga terbuka dan menerima segala sesuatu yang masuk kedalamnya, sehingga sangat mudah bagi yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya untuk berbaur dan berinteraksi dengan baik. Masyarakat pribumi cenderung terbuka dan menerima kedatangan etnis Tionghoa dengan baik. Walaupun sebagian masih susah menerimanya dengan baik karena berbagai perbedaan baik karakter maupun kebudayaan.

Keberagaman orang Tionghoa di Blambangan memang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, karena pada dasarnya mereka juga berasal dari beberapa suku yang berbeda. Selain karena kedatangannya yang bertahap dari beberapa periode pelayaran, mereka juga berasal dari berbagai daerah yang berbeda dari dataran China. Dengan

demikian ada beberapa suku yang berbeda dengan budaya yang juga beragam dari kalangan orang Tionghoa yang ada di Blambangan ini. Keberagaman tersebut juga berpengaruh terhadap pola interaksi dan akulturasi yang terjalin antara orang Tionghoa dengan penduduk setempat. Ada yang dengan mudah menyatu dengan budaya lokal (Jawa) dan sebaliknya masih ada juga yang sukar untuk membaaur dengan kebudayaan lokal bahkan cenderung eksklusif.

Dengan demikian, tidak sedikit kebudayaan China yang berakulturasi dengan kebudayaan Jawa dan membentuk budaya sendiri. Wayang yang kita kenal dalam masyarakat Jawa ternyata juga dapat kita temui di kalangan Tionghoa. Dari sekian banyak wayang yang ada di Indonesia beberapa di antaranya adalah hasil akulturasi kebudayaan China dan Jawa diantaranya wayang Potehi dan wayang kulit Cina-jawa. Keberadaan wayang Potehi dan wayang kulit Cina-Jawa sudah cukup lama. Mereka biasa digelar di klinteng- klinteng Cina di Pulau Jawa. Keduanya mengisahkan mitos dan legenda Tiongkok seperti *Sam Kok*, *San Pek Eng Tai*, *Li Si Bin*. Bahasa yang digunakan, bahasa Melayu untuk wayang Potehi dan bahasa Jawa untuk wayang kulit Cina-Jawa.

Kehidupan sosial keagamaan masyarakat Tionghoa dan Pribumi di Blambangan

Dalam penelitian yang dilakukan Sumanto Al Qurtubi eksistensi Tionghoa Muslim pada awal perkembangan Islam di Jawa tidak hanya ditunjukkan oleh kesaksian-kesaksian para pengelana asing, sumber-sumber Cina, teks lokal Jawa maupun tradisi lisan saja, melainkan juga dibuktikan dengan berbagai peninggalan purbakala Islam Jawa. Ini mengisyaratkan adanya pengaruh yang sangat kuat dari Cina yang di temukan dalam adanya ukiran padas di masjid kuno mantingan jepara, menara masjid pecinan Banten, arsitektur keraton Cirebon beserta taman sunyaragi dan berbagai peninggalan kuno lainnya.

Namun akibat hegemoni yang dilakukan pemerintah kolonial membelokkan pandangan masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa sebagai suatu kelompok masyarakat ideentik dengan kepercayaan konghucisme. Kelompok ini di mata masyarakat pribumi dipandang sebagai kelompok yang cenderung eksklusif dan cenderung kikir. Di Indonesia pada umumnya terdapat tiga kepercayaan yang melekat erat pada kelompok etnis Tionghoa, kepercayaan tersebut adalah agama Budha, Taoisme dan Konfusianisme. Salah satu yang paling berpengaruh dan mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat Tionghoa adalah ajaran Konfusianisme. Begitu kentalnya pengaruh kepercayaan tersebut tidak dapat di pungkiri lagi, karena di negeri asalnya ajaran ini telah di anut lebih dari dua ribu tahun lamanya.

Ikatan kekeluargaan di kalangan masyarakat Tionghoa sangat kuat yang membuat kelompok etnis tersebut cenderung eksklusif dan sukar berbaur dengan masyarakat di luar kelompok mereka. Hal ini dapat dipahami karena pengaruh kepercayaan yang mereka anut. Dalam kepercayaan Konfusius ada sebuah ajaran sistem familiisme yang secara umum memberikan pengertian bahwa segala sesuatu itu dilakukan untuk kepentingan dan ditunjukkan kepada keluarga. Dengan kata lain mereka selalu menjunjung tinggi kepentingan keluarga di atas kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, bangsa atau Negara dan bahkan kepentingan pribadi.

Sementara warga pribumi yang sebagian besar beragama Islam, namun masih kental dengan kebudayaan Hindu Budha karena sudah berabad-abad dari nenek moyang mereka menganut ajaran Hindu Budha. Karakter mereka cenderung lebih terbuka dan menerima berbagai kebudayaan yang masuk kedalamnya, sehingga tidak sulit bagi masyarakat Tionghoa untuk masuk dan berbaur di lingkungan mereka.

Seiring perkembangannya kelompok masyarakat Tionghoa di Blambangan menunjukkan keragamannya dalam hal keberagaman. Diantaranya terdapat pemeluk agama Kristen (Protestan) yang memegang erat dan menjalankan ajaran agamanya dengan sangat ketat. Ketaatannya dalam menjalankan ajaran agamanya membawanya pada penghayatan terhadap nilai-nilai familiisme yang di wariskan oleh generasi sebelumnya. Namun sebaliknya yang beragama Katolik cenderung memiliki pemikiran yang bebas dan terbuka terhadap pengaruh dari luar untuk memperoleh hal-hal baru. Hal inilah yang membuat mereka terlepas dari ikatan kelompok dan aturan-aturan dalam keluarga, khususnya nilai-nilai yang bersifat tradisional seperti nilai-nilai familiisme. Begitu pula dengan orang Tionghoa yang memeluk agama Islam, mereka tidak mempunyai tingkat familiisme yang tinggi karena dalam ajarannya tidak pembentukan nilai-nilai familiisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.

Kecenderungan dalam keberagaman yang ada dalam masyarakat Tionghoa, menciptakan tingkatan interaksi terhadap masyarakat pribumi yang berbeda satu dengan yang lain. Mereka yang masih memegang erat dan menjalani ajaran dan sifat tradisional Konfusius cenderung lebih tertutup dan memiliki tingkatan interaksi yang rendah dengan masyarakat pribumi. Sedangkan pemeluk agama katolik dan Islam yang cenderung lebih terbuka dan memiliki tingkatan interaksi yang tinggi dan bahkan dapat menyatu dengan warga pribumi.

Bahkan di kalangan Tionghoa muslim, karena adanya kesamaan agama dengan warga pribumi yang mayoritas muslim, ada yang benar-benar menyatu dengan masyarakat setempat dan enggan di sebut sebagai orang Tionghoa. Namun ada juga sebagian Tionghoa muslim yang berafiliasi dalam suatu organisasi yang kental dengan ke-Tionghoan, salahsatu yang menonjol adalah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI).

Interaksi sosial etnis Tionghoa dengan masyarakat

Sebelum berdirinya kota Blambangan orang-orang Tionghoa sudah banyak tersebar di wilayah Blambangan yang dulunya masih dalam daerah teritorial Kerajaan Mataram, terutama di pusat-pusat perekonomian. Hingga diresmikannya kota Blambangan akibat perjanjian Giyanti pada tahun 1755 orang-orang Tionghoa mulai banyak berdatangan dari berbagai daerah. Keberadaan orang-orang Tionghoa turut berperan penting dalam perkembangan perekonomian di wilayah Blambangan.

Adanya peraturan yang melarang kegiatan ekonomi orang Tionghoa pada bidang non-komersil pada era orde baru mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bidang perdagangan. Berbagai peraturan yang diberlakukan melalui Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa dianggap mendiskriminasi warga Tionghoa. Hingga pasca kemerdekaan Indonesia masih dikeluarkan perundangan serupa, salah satunya PP NO 10 1959 (Peraturan ini melarang pedagang eceran asing (Tionghoa) untuk beroperasi di wilayah pedesaan). Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak pemerintahan Hindia Belanda yang mengeluarkan *Wijkenstesel* pada tahun 1835 yang berisi perintah untuk menempatkan orang Tionghoa pada suatu area khusus/pecinan. Ada juga Undang-Undang Agraria pada 1870 yang berisi larangan bagi orang Tionghoa untuk menjadi petani. Di Blambangan sendiri dikeluarkan Staatblad 1891 No. 214 (Peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi jumlah orang Tionghoa yang ingin masuk ke daerah Blambangan, kecuali dengan prosedur khusus).

Namun di Blambangan sendiri, hubungan hubungan elite pemerintahan khususnya Kesultanan dengan masyarakat Tionghoa cenderung baik. Hal ini terlihat dari adanya

beberapa tokoh penting dalam kesultanan Blambangan yang merupakan keturunan Tionghoa. Bahkan selir Hamengkku Buono II berasal dari keturunan Tionghoa. Banyak di antara orang-orang Tionghoa yang berdekatan dengan kesultanan mendapat gelar kebangsawanan dan juga menjadi pejabat pemerintahan. Salah satunya diangkatnya seorang kapitan Cina Tan Jin Sing sebagai Bupati Blambangan dan mendapatkan gelar kebangsawanan K.R.T. Secodiningrat. Hubungan baik antara Kesultanan Blambangan dengan Orang-orang Tionghoa juga diabadikan dalam prasasti dari batu marmer yang didatangkan dari negeri Cina sebagai persembahan kepada Sri Sultan Hamengku Buono IX saat peringatan pengangkatannya sebagai Raja di Kesultanan Blambangan. Prasasti tersebut masih tersimpan dan terpelihara dengan baik di kompleks istana.

Keberhasilannya dalam bidang bisnis merupakan sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Mereka membuktikan diri bahwa mereka orang yang cerdas dan rajin dalam mencari kekayaan. Meskipun populasinya masih sangat sedikit dibandingkan dengan warga pribumi, namun karena pada umumnya profesi mereka sebagai pedagang dan mobilitasnya sangat tinggi keberadaan mereka cukup di perhitungkan. Kemapanan dalam bidang ekonomi tersebut membuat hubungan mereka dengan para pejabat pemerintahan begitu dekat.

Dalam penguasaan di bidang ekonomi kelompok etnis Tionghoa cenderung seimbang dengan para pengusaha pribumi. Persaingan dalam bidang usaha baik menengah maupun berskala besar juga relative kecil bahkan hampir tidak ada persinggungan. Hal ini karena pada umumnya pengusaha pribumi lebih banyak terjun dalam bisnis batik, perhotelan, kerajinan perak, pom bensin, jasa pariwisata, dan cinderamata. Sedangkan pengusaha Tionghoa lebih dominan dalam bisnis mobil, motor, bengkel dan onderdil, barang elektronik, emas, pabrik tekstil, toko besar dan bangunan. Bahkan di sepanjang jalan Malioboro, di depan toko milik orang Tionghoa terdapat pedagang kaki lima yang berjualan secara berdampingan. Hal ini juga menunjukkan kedekatan antara pengusaha Tionghoa dengan pedagang pribumi.

Interaksi sosial etnis Tionghoa dengan masyarakat Blambangan

Pada mulanya orang Tionghoa hanya menempati pemukiman-pemukiman khusus orang Tionghoa sehingga intensitas interaksi yang terjalin dengan warga pribumi hanya terbatas pada interaksi perdagangan. Namun seiring perkembangan kota Blambangan orang-orang Tionghoa mulai tersebar di berbagai wilayah Blambangan, mereka tersebar di jalan-jalan utama kota Blambangan dan berbaur dengan warga di sekitar tempat tinggalnya. Komunitas Tionghoa yang tinggal di Blambangan dalam kehidupan sehari-hari sering diterima sekaligus di tolak oleh masyarakat pribumi. Penolakan yang dialami dapat datang dengan berbagai alasan, misalnya kecemburuan, ketakutan, kemarahan, dan sebagainya. Orang Tionghoa kurang bergaul dengan alasan kesibukan pekerjaan. Salah satu sifat positif orang Tionghoa adalah pekerja keras, sehingga jika mereka bekerja sering kurang melihat waktu dan mengabaikan hal-hal yang sifatnya sosial. Etnis Tionghoa sejak kedatangannya ke Blambangan sudah terkenal dengan mata pencahariannya dengan berdagang, juga terkenal sudah turun menurun tinggal di Blambangan, mereka hidup berdampingan dengan masyarakat pribumi.

Seperti yang kita ketahui pada umumnya, orang-orang Tionghoa di Blambangan mayoritas adalah sebagai pedagang, baik pedagang kecil maupun pedagang dengan skala besar. Hal ini secara tidak langsung mendorong orang-orang Tionghoa untuk tetap menjalin relasi dengan warga pribumi untuk kepentingan perdagangan mereka. Untuk mempermudah urusan dagang mereka harus menjalin hubungan yang baik dengan

warga pribumi. Seiring dengan perkembangan kota Blambangan orang-orang Tionghoa mulai tersebar tidak hanya di kompleks-kompleks pecinan namun juga di berbagai wilayah di kota Blambangan.

Sejauh pengamatan yang penulis lakukan terhadap interaksi sosial yang terjalin antara orang-orang Tionghoa dengan warga pribumi di kranggan, yakni kompleks pemukiman orang-orang Tionghoa di pusat kota Blambangan, terlihat sebuah kesenjangan dalam interaksi yang terjalin antara keduanya. Kegiatan perdagangannya membuat mobilitas mereka sangat tinggi sehingga membuat pergaulan mereka dengan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka sangat jarang terjadi. Orang-orang Tionghoa terlihat cenderung eksklusif dan tertutup terhadap warga pribumi. Mereka (orang Tionghoa) yang pada umumnya lebih orang Tionghoa dengan urusan bisnisnya. Anak-anak mereka juga di masukkan dalam sekolah-sekolah unggulan dengan murid-murid yang kebanyakan dari golongan mereka. Hal ini secara tidak langsung menutup pergaulan mereka dengan anak-anak keturunan pribumi yang pada umumnya bersekolah di sekolah-sekolah umum.

Karena sikapnya dalam pergaulan sehari-hari yang cenderung tertutup ini stereotip terhadap orang-orang Tionghoa yang eksklusif semakin subur tertanam pada warga pribumi. Sebagian besar orang pribumi menganggap orang-orang Tionghoa sebagai kelompok yang eksklusif dan hanya mengumpulkan harta dan melupakan kehidupan sosialnya. Walaupun sebagian orang Tionghoa mempekerjakan orang pribumi dalam usaha perdagangannya namun intensitas hubungan yang terjalin antara keduanya kurang begitu baik. Beberapa warga pribumi yang penulis wawancarai mengungkapkan bahwa hubungannya dengan orang-orang Tionghoa hanya sebatas partner kerja dan relasi sosial yang terjalin hanya untuk kepentingan ekonomi bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan orang-orang Tionghoa yang tinggal di wilayah kompleks Tionghoa atau pecinan, orang-orang Tionghoa yang tinggal di luar wilayah itu cenderung lebih terbuka dan tidak lagi eksklusif. Dalam kehidupan sehari-hari interaksi yang terjalin dengan warga pribumi juga lebih terbuka sehingga membuat hubungannya dengan warga pribumi juga lebih baik. Ini terlihat pada interaksi yang terjadi antara orang-orang Tionghoa yang bermukim satu tempat dengan orang pribumi di beberapa pemukiman yang mayoritas dihuni oleh orang-orang pribumi. Orang-orang Tionghoa yang tinggal di pemukiman tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada dan berbaur tanpa suatu sekat yang menghalangi interaksi yang terjalin.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang orang-orang Tionghoa juga menggunakan bahasa Jawa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Bahkan dalam lingkungan keluarga orang-orang Tionghoa juga lebih banyak memakai bahasa Jawa untuk berkomunikasi dengan sesama orang Tionghoa. Tidak jarang juga bahasa Jawa yang digunakan termasuk bahasa Jawa *ngoko* (bahasa Jawa yang halus) yang biasa digunakan oleh masyarakat pribumi. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan seseorang untuk saling berinteraksi. Bahasa Jawa memiliki suatu sistem tingkat-tingkat yang sangat rumit, terdiri dari paling sedikit sembilan gaya bahasa. Sistem ini menyangkut perbedaan-perbedaan yang wajib digunakan, mengingat perbedaan kedudukan, pangkat, umur, serta tingkat keakraban antara yang menyapa dan yang disapa. Dalam konsepsi orang Jawa, berbagai gaya ini menyebabkan adanya tingkat-tingkat bahasa yang berbeda-beda tinggi rendahnya. Tiga gaya yang paling dasar, yaitu gaya tidak resmi, gaya setengah resmi, dan gaya resmi (*Ngoko*, *Madya*, dan *Krama*).

Dalam hal ini terlihat adanya usaha orang-orang Tionghoa melakukan proses Asimilasi (*Assimilation*) yaitu sebuah usaha untuk mengurangi perbedaan yang terdapat

antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan. Dalam hal ini terlihat adanya usaha untuk mengurangi perbedaan antara mereka yang dilakukan oleh orang Tionghoa yang tinggal di pemukiman masyarakat pribumi agar dapat berbaur dan menyatu dengan warga pribumi. Proses asimilasi tersebut terlihat jelas pada segi bahasa jawa yang banyak dikuasai orang-orang Tionghoa dan juga digunakan dalam praktiknya sehari-hari saat berinteraksi dengan warga pribumi. Proses asimilasi ini berhasil menghilangkan sekat antara kedua kelompok etnis tersebut dalam interaksi yang dilakukan sehari-hari.

Dari berbagai pola interaksi yang ada, terlihat perbedaan yang mencolok antara orang Tionghoa yang tinggal di daerah pemukiman Tionghoa dengan orang Tionghoa yang tinggal di luar daerah tersebut. Orang Tionghoa yang tinggal di daerah khusus pecinan cenderung terlihat lebih eksklusif dan sukar untuk menyatu dengan orang-orang pribumi. Sementara orang Tionghoa yang tinggal di luar pemukiman Tionghoa lebih dapat menyatu dengan warga pribumi.

KESIMPULAN

Keberadaan orang-orang Tionghoa sudah ada sejak Nama Indonesia belum ada bahkan sejak awal masehi orang-orang Tionghoa sudah melakukan Interaksi dengan penduduk Nusantara. Hal ini sebagai akibat dari hubungan dagang antara India dengan Cina. Secara umum dalam kajian ini keberadaan etnis Tionghoa mencoba dikaji sejak zaman klasik sampai dengan zaman orde baru.

Penduduk Tionghoa dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu Orang Tionghoa adalah orang Tionghoa asli sedang peranakan adalah orang Tionghoa hasil kawin campur dengan penduduk setempat. Kedua, tempat kelahiran. Tionghoa totok lahir di negeri Cina sedangkan Tionghoa peranakan lahir di Indonesia. Ketiga adalah berdasarkan aspek sosial cultural. Tionghoa totok masih berbahasa mandarin dan memegang teguh tradisi China, sedangkan tionghoa keturunan sudah berbaur dan bercampur dengan tradisi setempat dan menggunakan bahasa masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan etnis Tionghoa dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu Kehidupan sosial kebudayaan masyarakat Tionghoa dan Pribumi di Blambangan; Kehidupan sosial keagamaan masyarakat Tionghoa dan Pribumi di Blambangan; Interaksi sosial etnis Tionghoa dengan masyarakat blambangan; dan akulturasi budaya masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Blambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Dahana, Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia, Jurnal Wacana, Vol 2 No 1, Jakarta : 2001 hlm, 54.
- FX. Lilik Dwi M. Imlek, *Tradisi Yang Tak Lagi Sendiri Jakarta* (ANTARA News). Dalam <http://www.antaraneews.com/berita/53516/imlek-tradisi-yang-tak-lagi-sendiri> diakses 29-03-2015
- Adrian Perkasa, *Orang-orang Tionghoa dan Islam di Majapahit*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012. hlm. 47.
- W.P.Groeneveldt, Nusantara dalam catatan Tionghoa. Jakarta: komunitas Bambu, 2009.hlm 63-69.
- Rustopo, Jawa Sejati, (*Otobiografi Go Tik Swan*). Blambangan: Penerbit Ombak, 2008.
- Daradjadi, Geger Pecinan 1740-1743, (*Persekutuan Tionghoa-Jawa melawan VOC*). Blambangan: Penerbit Buku Kompas, 2013. hlm, 68.

- Choirul Mahfud. *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*. Blambangan: Pustaka Pelajar, 2013, hlm, xii.
- Leo Surtyadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Press, 1984. hlm, 5.
- Muh. Yamin, penyunting. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid 1*. Jakarta: Prapanca 1959, hlm. 28.
- Hermawas Sulisty. *Palu dan Arit di Ladang Tebu, (Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan)*, Jakarta: Gramedia, 2003. hlm, 17.
- G. William Skinner, *The Chinese in Indonesia*, dalam Rurh McVey (ed.), INDONESIA, (New Heaven: Connecticut, 1963), hlm. 105-106
- Charles Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm, 23-25.
- Dwi Woro R. Mastut, *Wayang Cina di Jawa Sebagai Wujud Akulturasi Budaya dan Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Makalah disajikan dalam Seminar Naskah Kuno Nusantara dengan tema Naskah Kuno Sebagai Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia di PNRI, Jakarta 12 Oktober 2004. hlm. 1
- Sumanto Al Qurtubi, *Arus Cina-Jawa-Islam, Bongkar Ssejarah Atas Peranan Tionghoa Dalam Penyebaran Agama Islam Di Nusantara Abad XV&XVI*. Blambangan: INSPEAL daan INTI, 2013.
- P. Hariyono, *Kultur Cina di Jawa, Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. hlm. 19.
- Pramoedya Ananta Toer, *Hoakiau di Indoesia*, Jakarta: Garba Budaya, 1999, hlm 132.
- R. Hardjono, *Komuniti Tionghoa Blambangan: Sejarah Minoritas Lokal dengan Focus Sosiologis*. hlm. 29.
- Budi Susanto, *Identitan dan Postkolonialisme di Indonesia*, Blambangan: kanisiun. 2003. hlm. 82-83.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 21-22